



KABUPATEN BADUNG

**RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2021**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2021**



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 70/051/HK/2020
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan prosedur dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Badung Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2021, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa wajib menyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung Tahun 2021, dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2021;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan sistematika Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung Tahun 2021, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun sebagai berikut :
- Bab I. Pendahuluan
Bab II. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun lalu
Bab III. Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Bab V. Penutup
- KETIGA : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 3 Agustus 2020


BUPATI BADUNG

NIOMAN GIRI PRASTA

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
2. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

DAFTAR ISI

Halaman

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 70/051/HK/2020 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
3.1 Tujuan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	26
3.2 Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	27
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
4.1. Program dan Kegiatan	28
BAB V. PENUTUP	34

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan s/d Tahun 2019 Kabupaten Badung.....	10
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat mempunyai makna membangun manusia Indonesia seutuhnya, dimulai dari tingkat Pemerintahan terbawah dengan memperhatikan nilai kondisi mereka sebagai masyarakat yang perlu ditumbuhkembangkan jasmani dan rohani serta intelegensinya.

Pemberdayaan masyarakat di Desa/Kelurahan perlu terus didorong melalui peningkatan koordinasi dan peningkatan pembangunan sektoral, pengembangan kemampuan Sumber Daya Manusia, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan penumbuhan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat sehingga mempercepat peningkatan dan perkembangan desa swadaya dan desa swakarya menuju desa swasembada. Kemampuan masyarakat desa untuk berproduksi dan memasarkan hasil produksinya perlu didukung dan ditingkatkan melalui penataan kelembagaan dan perluasan serta diversifikasi usaha agar makin mampu mengarahkan dan memanfaatkan dana, daya bagi peningkatan pendapatan dan taraf hidupnya. Pembangunan berbagai sarana dan prasarana perekonomian termasuk koperasi dan lembaga keuangan ditingkatkan agar mampu berperan dalam pengembangan ekonomi rakyat dan makin meningkatkan swadaya masyarakat dalam pembangunan.

Tantangan yang dihadapi dalam Pemberdayaan Masyarakat adalah meningkatkan fungsi lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan desa untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan, mengurangi kesenjangan masyarakat dalam pembangunan serta mengatasi masalah kemiskinan. Berkenaan dengan hal-hal tersebut dan dalam rangka terselenggaranya good governance yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat maka dalam tahun 2021 tetap mengambil langkah-langkah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban dengan pola yang telah komprehensif dengan lebih menekankan pada partisipasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna dan berhasilguna. Dalam rangka pencapaian hasil yang lebih optimal disusunlah program/Rencana Kerja Tahunan sebagai arahan dan pedoman untuk mencapai sasaran-sasaran kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 ini.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021;

1.3. Maksud dan Tujuan

- a. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran yang jelas tentang rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten badung Tahun 2021
- b. Tujuan Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung Tahun 2021, disamping untuk memudahkan pencapaian sasaran dan strategi penggunaan sumber daya. Dapat juga menjadi alat pengukur kemajuan pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- 3.1. Tujuan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021
- 3.2. Sasaran Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- 4.1. Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung Tahun 2019 dan perkiraan capaian kinerja Tahun Anggaran 2020. Secara umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJM Kabupaten Badung tahun 2016-2021.

Untuk anggaran Perubahan tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung melaksanakan 9 (sembilan) program 40 (empat puluh) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.918.810.299,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 9.033.111.070,00 terealisasi Rp. 8.823.760.676,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 8.885.699.229,00 terealisasi Rp. 8.173.329.517,00.

Untuk anggaran Induk dalam tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung melaksanakan 9 (sembilan) program 38 (tiga puluh delapan) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 13.482.886.607,49 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 7.979.263.403,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 5.503.623.204,49.

Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 dan capaian tahun 2020 serta realisasi target Renstra sampai dengan tahun 2020 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar dapat tercapainya tujuan organisasi dalam hal pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran sehingga tugas rutin Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung dapat berjalan lancar sesuai jadwal yang direncanakan.dalam satu tahun anggaran. Program ini terdapat 14 (empat belas) kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 688.897.089,76 dan realisasi sampai bulan Maret sebesar Rp. 160.087.595,00, capaian kinerja mencapai 23,24 %.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program kerja ini ditetapkan agar tujuan organisasi dapat tercapai khususnya dalam hal pelayanan sarana dan prasarana sehingga pelaksanaan tugas tugas kedinasan dapat berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Pada program ini terdapat 4 (empat) kegiatan dengan pagu anggaran Rp.220.430.860,00 dan realisasi sampai bulan Maret Rp. 23.359.000,00, capaian kinerja mencapai 10,60 %.
3. Program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program ini ditetapkan untuk menunjang peningkatan Sistem pelaporan Kinerja perangkat daerah. Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 348.359.665,42 dan realisasi sampai bulan Maret Rp. 23.605.300,00, capaian kinerjanya mencapai 6,78 %.
4. Program perencanaan dan penganggaran SKPD. Program ini ditetapkan untuk mencapai tujuan Dinas dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran Dinas dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pada program ini ada 1 (satu) kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 9.999.849,30 dan realisasi sampai bulan Maret Rp. 3.923.800,00, capaian kinerjanya mencapai 39,24 %,
5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan. Ditetapkan dengan maksud agar tujuan pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana khususnya dalam hal pembinaan, pelatihan bagi lembaga-lembaga kemasyarakatan dan lembaga desa agar lebih berperan dalam pelaksanaan pembangunan desa maupun fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat selama 1 (satu) tahun anggaran. Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 157.535.614,59 dan realisasi sampai bulan Maret Rp. 85.562.200,00 capaian kinerja mencapai 54,31 %.
6. Program pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar tujuan pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana khususnya dalam hal pemberdayaan usaha-usaha ekonomi di pedesaan sehingga dapat didorong sebagai Pendapatan Asli Desa, selama satu (satu) tahun anggaran. Pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 185.257.997,31 dan realisasi sampai bulan Maret Rp. 4.217.800,00 capaian kinerja mencapai 2,28 %.

7. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar tujuan pemberdayaan Masyarakat desa dapat ditingkatkan khususnya program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) selama 1 (satu) tahun anggaran. Pada program ini terdapat 4 (empat) kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 1.375.533.658,82 dan realisasi sampai bulan Maret Rp. 51.143.900,00 capaian kinerja mencapai 3,72 %.

- 8 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar tujuan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat terlaksana dalam hal meningkatkan kapasitas serta kinerja aparatur pemerintahan desa dalam Pelayanan dan tatakelola pemerintahan desa selama 1 (satu) tahun anggaran. Pada program ini terdapat 4 (empat) kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 1.930.476.007,72 dan realisasi sampai bulan Maret Rp. 34.105.000,00 capaian kinerja mencapai 1,77 %.

9. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar tujuan mendorong swadaya murni masyarakat serta peningkatan peran serta masyarakat Desa maupun Kelurahan dalam program pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran. Pada program ini terdapat 4 (empat) kegiatan dengan pagu anggaran 587.132.461,57 dan realisasi sampai bulan Maret Rp. 39.446.000,00 (96,33%). Capaian kinerja mencapai 6,72 %.

Untuk lebih rincinya dapat dilihat dalam tabel 2.1

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa s/d Tahun 2020
Kabupaten Badung

Nama PD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Th n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program/ Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan/n-1 (2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Renstra PD s/d Tahun berjalan	
								Target Renja PD Tahun n-2	Realisasi Renja PD Tahun n-2	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (2020)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=10/4
2				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR									
2	07			BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
2	07	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	100%	100,00
			01	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Jumlah buku/lembar administrasi keuangan	50 Buku Cek 750 lbr materai 3000 1.750 lbr materai 6000	10 Buku Cek 150 lbr materai 3000 350 lbr materai 6000	10 Buku Cek 150 lbr materai 3000 350 lbr materai 6000	10 Buku Cek 150 lbr materai 3000 350 lbr materai 6000	100,00 100,00 100,00	10 Buku Cek 150 lbr materai 3000 350 lbr materai 6000	30 450 1050	60 60,00 60,00
			02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah biaya jasa komunikasi yang digunakan	9 buah telepon	9 buah telepon	9 bh telepon	9 bh telepon	100,00	9 bh telepon	27	300

			06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah biaya perijinan kendaraan dinas/operasional yang digunakan	8 unit roda 4 12 unit sepeda motor	7 unit roda 4 12 unit sepeda motor	8 unit roda 4 12 spd mtr	8 unit roda 4 12 spd mtr	100,00 100,00	8 unit roda 4 12 spd mtr	8 12	100 100,00
			11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	100,00	10 jenis	10	100
			12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	jumlah jenis komponen instalasi listrik yang digunakan	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100,00	2 jenis	2	100
			15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah exemplar bacaan dan peraturan perundang-undangan	900 eksemplar	540 eksemplar	540 eksemplar	540 eksemplar	100,00	540 eksemplar	1.620	180
			17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah jenis makanan dan minuman tamu yang tersedia	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100,00	5 jenis	5	100
			18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi luar daerah	6 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	100,00	1 Ls	3	50
			19	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap (upah THL selama 1 tahun)	Jumlah pegawai tidak tetap	2 orang	2 orang	1 orang	1 orang	100,00	1 orang	2	100
			20	Penyediaan dekorasi	Jumlah jenis perlengkapan dekorasi	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100,00	3 jenis	3	100
			21	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah liter bahan bakar kendaraan dinas/operasional	99.852 liter	26.640 liter	26.640 liter	26.640 liter	100,00	26.640 liter	79.920	80

			22	Penyediaan upacara keagamaan	Jumlah jenis upacara keagamaan	12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	100,00	12 jenis	12	100
			23	Lomba-lomba Olah Raga / Kesenian pada Hari-hari Bersejarah	Jumlah jenis lomba-lomba olah raga dan kesenian	5 jenis	6 jenis	0	0	0	0	6	120
			24	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	26 jenis	26 jenis	26 jenis	26 jenis	100,00	26 jenis	26	100
			25	Pelaksanaan upacara penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat	Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan	6 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	100,00	1 Ls	3	50
		02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	100%	100,00
			07	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang diadakan	10 jenis	4 jenis	0	0	0	0	4	40
			09	Pengadaan peralatan kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan kantor	25 jenis	6 jenis	0	0	0	0	6	24
			22	Pemeliharaan gedung kantor	Jumlah jenis gedung kantor yang dipelihara	3 jenis	3 jenis	0	0	0	3 jenis	3	100
			24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	8 unit roda 4 12 unit spd motor	8 unit roda 4 12 unit spd motor	8 unit roda 4 12 unit spd motor	8 unit roda 4 12 unit spd motor	100,00	8 unit roda 4 12 unit spd motor	8 12	100
			26	Pemeliharaan perlengkapan	Jumlah jenis perlengkapan kantor	1	1	1	1	100,00	1	1	100

				kantor	yang dipelihara	jenis	jenis	jenis	jenis		jenis		
			28	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah jenis peralatan kantor yang dipelihara	7 jenis	6 jenis	7 jenis	7 jenis	100,00	7 jenis	7	100
		06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan	Cakupan laporan capaian kinerja dan keuangan Kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	100%	100,00
			01	Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah waktu Laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	36	60
			05	Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Laporan AKIP	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100,00	4 dokumen	12	300
		09		Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah Dengan RKPDP	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100,00	3 dokumen	3 dokumen	100
			06	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja RKA)	Jumlah buku/dokumen perencanaan	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100,00	3 dokumen	9	300
		15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase kelompok binaan lembaga kemasyarakatan	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	100%	100,00
			02	Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) TK, SD	Jumlah siswa TK, SD yang mendapat makanan tambahan	3.625 orang	725 orang	0	0	0	0	725	20
			03	Monitoring dan evaluasi Sistem Informasi	Jumlah Kecamatan yang dimonev	6	0	6	6	100,00	6	6	

[illegible]

18	05	Pembinaan dan Evaluasi 10 Program	Jumlah Kecamatan yang dibina	6	6	6	6	100,00	6	6	100
		Pokok PKK	dan dievaluasi	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan		Kecamatan		
	06	Pembinaan dan Evaluasi KG PKK KB/Kes, Posyandu, PHBS dan LBS di Kabupaten Badung	Jumlah KG PKK KB/Kes., Posyandu PHBS dan LBS yang dibina	6	6	6	6	100,00	6	6	100
				Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan		Kecamatan		
	07	Pemberdayaan TP PKK Kabupaten Badung	Jumlah peningkatan wawasan dan pengetahuan dari Kader PKK	6	6	6	6	100,00	6	6	100
				Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan		Kecamatan		
	08	Jambore Kader PKK	Jumlah Kader PKK yang mengikuti jambore	12	12	12	12	100,00	12	12	100
				TP PKK	TP PKK	TP PKK	TP PKK		TP PKK		
	09	Lomba-lomba PKK dalam Rangka HUT Kota Mangupura	Jumlah jenis lomba yang diadakan dalam Rangka HUT Kota Mangupura	2	2	2	2	100,00	-	2	100
				jenis	jenis	jenis	jenis				
	10	Penyelenggaraan tari Pendet Massal Dalam Rangka HUT Mangupura	Jumlah jenis tarian dalam Rangka HUT Mangupura	1	1	0	0	0	0	1	100
				jenis	jenis						
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Aparatur Pemerintahan Desa yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik	62 desa/kel.	62 desa/kel.	62 desa/kel.	62 desa/kel.	100,00	62 desa/kel.	62	100
	08	Bimtek Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah perangkat desa yang mengikuti Bimtek	448 orang	112 orang	0	0	0	0	112	25
		di Kabupaten Badung									
	09	Bimbingan Teknis Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES)	Jumlah aparatur desa yang mengikuti Bimtek	138 orang	138 orang	0	0	0	0	138	100
	10	Pembinaan/Monitoring Pemilihan dan Pelantikan Waktu Perbekel di Kabupaten Badung	Jumlah Perbekel yang dilantik	44 desa	3 desa	0	0	0	0	3	7
	14	Penyerahan, Pembinaan dan Monitoring Dana	Jumlah desa, Br. Adat yang	46	46	46	46	100,00	46	46	100

		11	Pembinaan Perkembangan Desa	Jumlah desa yang dibina	24 desa	6 desa	0	0	0	0	6	25,00
		12	TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	Jumlah pembangunan rabat, ke 101 Kabupaten Badung Tahun 2018	1 bedah rumah 615 m senderan jalan	1 bedah rumah 615 m senderan jalan	0	0	100,00	0	1	100,00
		19	Monitoring dan Inventarisasi Swadaya	Jumlah desa yang dimonitoring/ Murni Masyarakat Kabupaten Badung	62 desa/kel.	62 desa/kel.	62 desa/kel.	62 desa/kel.	100,00	62 desa/kel.	186	100,00
		32	Pembinaan Penyusunan Profil Desa Tingkat Kabupaten	Jumlah Profil Desa/Kelurahan yang dievaluasi	62 desa 6 Kec.	62 desa 6 Kec.	62 desa 6 Kec.	62 desa 6 Kec.	100,00	62 desa 6 Kec.	186	100,00
		37	Evaluasi perkembangan desa/kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang dievaluasi	29 desa/kel.	6 desa/kel.	0	0	0	0	6	100,00
		41	Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong dalam Membangun Desa	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan BBGRM	62 desa/kel.	62 desa/kel.	62 desa/kel.	62 desa/kel.	100,00	62 desa/kel.	186	100,00
			Pembinaan dan evaluasi Perkembangan Desa	Jumlah desa yang dibina dan dievaluasi	24 desa	6 desa	5 desa	5 desa	100,00	5 desa	16	100,00
	20		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Keluarga Penerima manfaat (KPM) yang belum mampu membeli beras dengan harga pasar	8.896	8.896	0	0	0	0	-	-
		01	Monitoring Rastra di Kabupaten Badung	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapat bantuan Rastra	KPM 8.896 KPM	KPM 8.896 KPM	0	0	0	0	8.896	100

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan daerah, Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah harus menelaah kebijakan dan program prioritas nasional sebagai upaya mensinergikan program pusat dan daerah. Dalam upaya mencapai tujuan yang hendak dicapai perlu kiranya kita mengetahui adanya faktor yang mempengaruhi sebagai kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung. melalui pendekatan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities and Berdasarkan hasil telaahan melalui pendekatan analisis SWOT tersebut ditetapkan isu-isu penting yaitu :

1. Peningkatan keberdayaan lembaga Desa dan lembaga kemasyarakatan;
2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Pemerintahan Desa;
3. Peningkatan partisipasi, keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat desa;
4. Peningkatan pembangunan lembaga ekonomi masyarakat DAN Peningkatan Pendapatan Asli Desa

Berdasarkan hasil kajian di atas maka tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2016 – 2021 adalah :

3.1. Tujuan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan desa;
2. Terwujudnya Akuntabilitas Kabupaten;

3.2. Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung sesuai yang tertuang dalam Renstra adalah:

1. Meningkatnya pelayanan Pemerintahan Desa yang berbasis IT;
2. Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;

3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan desa;
4. Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun desa;
5. Meningkatnya pemberdayaan potensi ekonomi desa;
6. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan kinerja aparatur;
7. Berfungsinya barang milik daerah dengan baik;
8. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur;
9. Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah;
2. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah.

Kegiatan : Administrasi Keuangan

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Kegiatan : Administrasi Umum

Sub Kegiatan :

1. Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan;
2. Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik;
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional;
4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan;
7. Penyediaan makanan dan minuman;
8. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
9. Penyediaan jasa pegawai tidak tetap;
10. Penyediaan alat tulis kantor;
11. Penyediaan bahan logistik kantor;
12. Pengadaan peralatan kantor;
13. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor ;
14. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ;
15. Pemeliharaan perlengkapan kantor ;
16. Pemeliharaan peralatan kantor.

B. Program Penataan Desa

Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Desa

Sub Kegiatan :

1. Fasilitasi Tata Wilayah Desa;
2. Penyediaan Dana Operasional, Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya Bagi Perangkat Pemerintahan Desa.

C. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan :

1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
3. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD;
4. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa.
5. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
6. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa.

D. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Kemasyarakatan Hukum Adat

Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelaku Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan;
2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
3. Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

(lihat Tabel 4.1.)

Tabel 4.1.																			
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 Dan Prakiraan Maju Tahun 2022																			
Kabupaten Badung																			
Kode					Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan				Perangkat	Jenis	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					Daerah
					DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA										6.613.632.905,24	7.274.996.195,76			
					Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar														
2	07	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTASI PERKANTORA N				Cakupan Layanan Administ rasi Perkantora n	100%						Rp 610.687.742,50	Rp 671.756.516,75		
2	07	01	01	01	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	DPMD			Jumlah buku/lemb ar administras i keuangan	350 meterai 6000, 150 meterai 3000, 10 buku cek	Terwujudnya ketertiban administrasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan	350 meterai 6000, 150 meterai 3000, 10 buku cek	Rp 3.135.000,00	Rp 3.448.500,00	Dinas Pemberday aan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan	
2	07	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	DPMD			Jumlah penyediaan jasa komunikasi	9 Telepon	Terciptanya kelancaran komunikasi dan berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas	9 Telepon	Rp 12.000.000,00	Rp 13.200.000,00	Dinas Pemberday aan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan	

2	07	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	DPMD			Jumlah biaya perijinan kendaraan dinas/operasional yang digunakan	12 Unit sepeda motor dan 8 unit mobil	Terciptanya ketertiban administrasi kendaraan dinas operasional kantor	12 Unit sepeda motor dan 8 unit mobil	Rp 12.700.000,00	Rp 13.970.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2	07	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	DPMD			Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	23 jenis	Terwujudnya kelancaran penyelenggaraan administrasi kantor	23 jenis	Rp 29.995.100,00	Rp 32.994.610,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2	07	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	DPMD			Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang digunakan	2 jenis	Tersedianya biaya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2 jenis	Rp 3.500.000,00	Rp 3.850.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2	07	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	DPMD			Jumlah eksemplar bacaan dan peraturan perundang-undangan	204 eksemplar	Terwujudnya peningkatan wawasan berpikir dan lebih tanggapnya aparatur dalam perkembangan informasi melalui media cetak dan literatur	204 eksemplar	Rp 19.908.000,00	Rp 21.898.800,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2	07	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	DPMD			Jumlah jenis makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	5 jenis	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk tamu dalam kunjungannya	5 jenis	Rp 12.945.000,00	Rp 14.239.500,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan

[illegible]

2	07	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR				Cakupan Layanan Sarana dan Prasaran a Aparatur	100%						Rp 199.471.940,00	Rp 219.419.134,00	Dinas Pemberday aan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2	07	01	02	22	Pemeliharaan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	DPMD			Jumlah jenis gedung kantor yang dipelihara	2 jenis	Terpeliharanya gedung kantor dengan baik	2 jenis	Rp 3.500.000,00	Rp 3.850.000,00	Dinas Pemberday aan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan	
2	07	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasi onal	IV. TATA KELOLA PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	DPMD			Jumlah unit kendaraan dinas/oper asional yang dipelihara	12 sepeda motor, 8 unit mobil operasio- nal	Tersedianya biaya untuk pemeliharaan kendaraan dinas/operasi onal	12 sepeda motor, 8 unit mobil operasio-nal	Rp 164.696.940,00	Rp 181.166.634,00	Dinas Pemberday aan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan	
2	07	01	02	26	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	DPMD			Jumlah jenis perlengkap an kantor yang dipelihara	1 jenis	Tersedianya biaya pemeliharaan perlengkapan kantor	1 jenis	Rp 3.000.000,00	Rp 3.300.000,00	Dinas Pemberday aan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan	
2	07	01	02	28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	DPMD			Jumlah jenis peralatan kantor yang dipelihara	6 jenis	Terwujudnya kelancaran kegiatan operasional kantor sesuai dengan tupoksiny	6 jenis	Rp 28.275.000,00	Rp 31.102.500,00	Dinas Pemberday aan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan	
2	07	01	06		PROGRAM PENGEMBAN GAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				Cakupan Layanan Capaian Kinerja dan Keuang an	100%						Rp 172.379.665,42	Rp 189.617.631,96		
2	07	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	IV. TATA KELOLA PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	DPMD			Jumlah waktu laporan kinerja dan ikhtisar	12 bulan	Tercapainya produktifitas dan kegiatan kinerja	12 bulan	Rp 166.380.000,00	Rp 183.018.000,00	Dinas Pemberday aan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan	

					Realisasi Kinerja SKPD	PUBLIK					realisasi kinerja PD							
2	07	01	06	05	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	DPMD			Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	4 dokumen	Tersedianya Laporan AKIP Perangkat Daerah	4 dokumen	Rp 5.999.665,42	Rp 6.599.631,96	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2	07	01	09		PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGARAN SKPD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	DPMD	Persentase Kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100%					Rp 9.999.849,30	Rp 10.999.834,23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2	07	01	09	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan P D (RENSTRA, RENJA, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	DPMD			Jumlah buku/dokumen perencanaan PD	3 dokumen	Tersedianya dokumen Renstra, Renja dan RKA PD	3 dokumen	Rp 9.999.849,30	Rp 10.999.834,23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2	07	01	15		PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN				Persentase kelompok binaan lembaga kemasyarakatan	6 Kecamatan					Rp 77.212.203,75	Rp 84.933.424,13		
2	07	01	15	06	Pendampingan Lembaga Desa/Kemasyarakatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Kecamatan se Kabupaten Badung			Jumlah Pendampingan Lembaga Desa/Kemasyarakatan	46 desa	Meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi Lembaga Desa/Kemasyarakatan di Kab.Badung	46 desa	Rp 35.895.054,80	Rp 39.484.560,28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan

2	07	01	15	06	Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Posyandu (SIP)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Kecamatan se Kabupaten Badung			Jumlah Kecamatan yang dimonev SIP	6 Kecamatan	Terbinanya Pengelola SIP di Kecamatan dalam Monev SIP	6 Kecamatan	Rp 41.317.148,95	Rp 45.448.863,85	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2	07	01	16		PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN				Jumlah lembaga ekonomi pedesaan yang aktif	46 Bumdesa, 32 Pasar Desa					Rp 482.760.109,73	Rp 531.036.120,70		
2	07	01	16	03	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Simpan Pinjam Untuk Perempuan (SPP)	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Kecamatan se Kabupaten Badung			Jumlah UPK dan SPP yang dibina	6 UPK dan SPP	Termotivasinya UPK dan SPP untuk peningkatan kualitas pengelolaan SPP	6 UPK dan SPP	Rp 23.698.509,73	Rp 26.068.360,70	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2	07	01	16		Pembinaan dan Evaluasi BUMDesa	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Desa se Kabupaten Badung			Jumlah Desa yang mendapat pembinaan dan evaluasi Bumdesa	46 desa	Terbinanya pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	46 desa	Rp 233.526.400,00	Rp 256.879.040,00		
2	07	01	16	10	Pembinaan Pasar Desa di Kabupaten Badung	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Desa se Kabupaten Badung			Jumlah Pasar Desa yang dibina	32 pasar desa	Tertatanya pengelola pasar di Kabupaten Badung	32 pasar desa	Rp 12.155.700,00	Rp 13.371.270,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2	07	01	16	11	Gelar TTG	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Luar Daerah			Terpublikasinya Teknologi Tepat Guna Kab.Badung di Luar Daerah	1 kali/tahun	Terserapnya informasi TTG berskala nasional dari masing - masing daerah untuk dapat dijadikan bahan dalam melaksanakan kebijakan pembanguna	1 kali/tahun	Rp 78.880.600,00	Rp 86.768.660,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan

												n di Kab.Badung						
2	07	01	16	15	Pembinaan dan Evaluasi Kelompok/Perseorangan Teknologi Tepat Guna Kabupaten Badung	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Desa se Kabupaten Badung			Jumlah kelompok TTG yang dibina dan dievaluasi	6 kelompok	Masyarakat Mampu Melaksanakan Teknologi Tepat Guna	6 kelompok	Rp 124.838.400,00	Rp 137.322.240,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2	07	01	16	18	Revitalisasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Desa se Kabupaten Badung			Jumlah kelompok Pamsimas yang direvitalisasi	6 kelompok	Terciptanya Tertib Tata Kelola Kelompok PAMSIMAS	6 kelompok	Rp 9.660.500,00	Rp 10.626.550,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2	07	01	17		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN				Peningkatan wawasan dan pengetahuan dari Kader PKK	12 TP PKK					Rp 2.087.754.742,82	Rp 2.296.530.217,10		
2	07	01	17	05	Pembinaan dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Kecamatan se Kabupaten Badung			Jumlah Kecamatan yang dibina dan dievaluasi	5 Kecamatan	Terwujudnya Pembinaan dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK	5 Kecamatan	Rp 171.030.133,50	Rp 188.133.146,85	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2	07	01	17	06	Pembinaan dan evaluasi dalam rangka lomba KGPKK KB/Kes, Posyandu,LBS, PHBS dalam Rumah Tangga	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Kecamatan se Kabupaten Badung			Jumlah Kecamatan yang mendapat pembinaan dan evaluasi dalam Lomba KG	5 Kecamatan	Ditetapkan pembinaan dan evaluasi dalam KG PKK KB/Kes. Posyandu, Lingkungan Bersih dan Sehat, PHBS	5 Kecamatan	Rp 321.681.687,30	Rp 353.849.856,03	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan

											PKK KB/Kes. Posyandu, Lingkungan Bersih dan Sehat, PHBS dalam rumah tangga		dalam Rumah Tangga					
2	07	01	17	07	Pemberdayaa n TP PKK Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Kecam atan se Kabupa ten Badung			Jumlah Desa/Kelur ahan dan Kecamatan yang mendapat peningkata n wawasan dan pengetahu an dari Kader PKK	5 Kecamatan	Meningkatny a pengetahuan dari Kader PKK	5 Kecamatan	Rp 458.365.781,58	Rp 504.202.359,74	Dinas Pemberday aan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2	07	01	17	08	Jambore Kader PKK	IV. TATA KELOLA PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Kecam atan se Kabupa ten Badung			Jumlah jenis lomba dalam Jambore	5 jenis	Terlaksanany a lomba- lomba dalam Jambore	5 jenis	Rp 636.593.140,44	Rp 700.252.454,48	Dinas Pemberday aan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2	07	01	17	11	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemberdayaa n Kesejahteraan Keluarga	IV. TATA KELOLA PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Kecam atan se Kabupa ten Badung			Jumlah Belanja yang dapat dilaksanaka n sebagai penunjang pelaksanaa n BKK TP PKK	9 belanja	Pelaksanaan BKK TP PKK berjalan lancar	9 belanja	Rp 500.084.000,00	Rp 550.092.400,00	Dinas Pemberday aan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
																Rp 0,00		
2	07	01	18		PROGRAM PENINGKATA N KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH AN DESA				Jumlah aparatur Pemerint ahan Desa yang mampu menjalan kan	46 desa					Rp 2.229.686.304,20	Rp 2.452.654.934,62		

								tugasnya dengan baik										
2	07	01	18	09	Pembinaan /Monitoring Pemilihan dan Pelantikan Perbekel di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Desa di Kabupa ten Badung			Jumlah Desa yang Perbekelny a baru dipilih dan dilantik	34 desa	Meningkatny a kemampuan, pengetahuan, sikap dan ketrampilan kepemimpina n Perbekel Terpilih di Kabupaten Badung	34 desa	Rp 849.467.157,42	Rp 934.413.873,16	Dinas Pemberday aan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2	07	01	18	04	Pembinaan Administrasi dan penyelenggar aan Pemerintahan desa di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Desa se Kabupa ten Badung			Jumlah desayang mendapat pembinaan adminstras i dan penyelengg araan Pemerintah an Desa	46 desa	Terisi dan tersedianya buku-buku administrasi dan terlaksananya Pemerintaha n Desa pada desa di Kabupaten Badung sesuai peraturan yang berlaku	46 desa	Rp 1.075.851.055,18	Rp 1.183.436.160,70	Dinas Pemberday aan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2	07	01	18	03	Evaluasi/Verifi kasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Induk dan Perubahan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Desa se Kabupa ten Badung			Jumlah desa yang dievaluasi/ verifikasi APBDes	46 desa	Tersusunnya APBDes dengan baik dan benar	46 desa	Rp 209.479.200,00	Rp 230.427.120,00	Dinas Pemberday aan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2	07	01	18	13	Penyerahan, Pembinaan dan Monitoring Dana Desa. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Desa se Kabupa ten Badung			Jumlah desa yang mendapat penyeraha n, pembinaan dan monitoring	46 desa	Terarahnya Penggunaan ADD dan Penyisihan Pajak Retribusi Daerah dengan baik	46 desa	Rp 94.888.891,60	Rp 104.377.780,76	Dinas Pemberday aan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan

					Daerah kepada Desa di Kabupaten Badung					Dana desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah		sesuai aturan						
2	07	01	19		PROGRAM PENNGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGU N DESA				Jumlah Desa/Kel urahan yang meningk at partisipa sinya dalam pembang unan	62 desa/k el.				Rp 743.680.347,52	Rp 818.048.382,27			
2	07	01	19	01	Pembinaan dan Penyusunan Profil Desa/Kelurah an Tingkat Kabupaten	IV. TATA KELOLA PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Desa/K elurah an se Kabupa ten Badung		Jumlah Desa, Kecamatan yang dibina dalam penyusuna n Profil Desa	62 desa/Kel.	Terbentuknya Buku Profil Desa Tingkat Kabupaten Badung	62 desa/Kel.	Rp 125.828.802,00	Rp 138.411.682,20	Dinas Pemberday aan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan	
2	07	01	19	03	Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat dalam Membangun Desa	IV. TATA KELOLA PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Desa/K elurah an se Kabupa ten Badung		Jumlah Desa/Kelur ahan yang melaksana kan pencanang an Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	62 desa/Kel.	Meningkatny a Kesadaran Masyarakat dalam Bergotong royong	62 desa/Kel.	Rp 93.431.100,00	Rp 102.774.210,00	Dinas Pemberday aan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan	
2	07	01	19	10	Monitoring dan Inventarisasi Swadaya Murni Masyarakat di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Desa/K elurah an se Kabupa ten Badung		Jumlah desa/kelur ahan yang dimonitori ng dan diinventaris asi Swadaya murni	62 desa/Kel.	Terlaksanany a Tabulasi Swadaya Murni Masyarakat	62 desa/Kel.	Rp 12.312.105,52	Rp 13.543.316,07	Dinas Pemberday aan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan	

2	07	01	19	11	Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Desa/Kelurahan se Kabupaten Badung			Jumlah desa yang dibina/dievaluasi	5 desa	Meningkatnya kapasitas lembaga pemerintahan desa dalam penataan administrasi	5 desa	Rp 500.022.000,00	Rp 550.024.200,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2	07	01	19	07	Pembinaan Pemekaran Br. Dinas dalam Desa	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Desa/Kelurahan se Kabupaten Badung			Jumlah desa yang dibina/dievaluasi	6 Br. Dinas	Terbentuknya 6 br dinas	6 Br. Dinas	Rp 12.086.340,00	Rp 13.294.974,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan

BAB V

PENUTUP

Pelaksanaan rencana kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung pada prinsipnya telah sesuai dengan rencana. Rencana kerja sebagaimana dimaksud diatas telah disesuaikan dengan bidang maupun program yang terdapat pada Renstra Daerah Kabupaten Badung.

Sekalipun berdasarkan atas analisis secara prinsip tidak ada masalah dalam melaksanakan kinerja kegiatan termasuk juga dalam pencapaian sasarannya kiranya kegiatan-kegiatan pada tahun berikutnya mengambil input yang betul-betul memperhatikan hasil temu karya yang sifatnya kongkrit di Desa melalui Musrenbang, diantaranya dengan memperhatikan aspek keterlibatan desa dalam pembangunan. Dalam pelaksanaan Forum SKPD hendaknya melibatkan elemen masyarakat yang sifatnya perwakilan seperti forum Perbekel, BPD, LPM, PKK, KPM, Kelian Dinas atau dari Tokoh masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat mempunyai makna membangun manusia Indonesia seutuhnya, dimulai dari tingkat Pemerintahan terbawah dengan memperhatikan nilai kondisi mereka sebagai masyarakat yang perlu ditumbuhkembangkan jasmani dan rohani serta intelegensinya.

Pemberdayaan masyarakat di Desa perlu terus didorong melalui peningkatan koordinasi dan peningkatan pembangunan sektoral, pengembangan kemampuan Sumber Daya Manusia, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan penumbuhan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat sehingga mempercepat peningkatan dan perkembangan desa swadaya dan desa swakarya menuju desa swasembada. Kemampuan masyarakat desa untuk berproduksi dan memasarkan hasil produksinya perlu didukung dan ditingkatkan melalui penataan kelembagaan ekonomi perdesaan dan perluasan serta diversifikasi usaha agar makin mampu mengarahkan dan memanfaatkan dana, daya bagi peningkatan pendapatan dan taraf hidupnya. Pembangunan berbagai sarana dan prasarana perekonomian termasuk koperasi dan lembaga keuangan ditingkatkan agar mampu berperan dalam pengembangan ekonomi rakyat dan makin meningkatkan swadaya masyarakat dalam pembangunan.



Tantangan yang dihadapi dalam Pemberdayaan Masyarakat adalah meningkatkan fungsi lembaga pemerintah dan Lembaga Desa/ kemasyarakatan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan, meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa, mengurangi

kesenjangan masyarakat dalam pembangunan serta mengatasi masalah kemiskinan.

Peningkatan Fungsi lembaga Desa dan Lembaga kemasyarakatan agar mampu berperan aktif dalam mengelola program pembangunan untuk mewujudkan ketahanan masyarakat.; Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pemerintahan Desa dalam rangka pemberian pelayanan dan peningkatan Keberdayaan masyarakat; Peningkatan Partisipasi, keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat desa ; Peningkatan Pembangunan Ekonomi masyarakat dan Peningkatkan Pendapatan Asli Desa

Berkenaan dengan hal-hal tersebut dan dalam rangka terselenggaranya good governance yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat maka dalam tahun 2020 tetap mengambil langkah-langkah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban dengan pola yang telah komprehensif dengan lebih menekankan pada partisipasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna dan berhasilguna.

Dalam rangka pencapaian hasil yang lebih optimal disusunlah program/Rencana Kerja Tahunan sebagai arahan dan pedoman untuk mencapai sasaran-sasaran kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 ini.


**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA**

KOMANG BUDHI ARGAWA, SH., M.SI.
PENPIN UTAMA MUDA
NIP. 19710901 199803 1 009


BUPATI BADUNG

NOMAN GIRI PRASTA